



Buletin Parlementaria

Nomor 978/IV/IX/2017 • September 2017



**Dana Desa Berpeluang
Sejahterakan Masyarakat**

**MKD Sosialisasikan
Kode Etik DPR ke Polda Jabar**

**Press Gathering
Diharapkan Bantu
Promosikan Potensi
Ekonomi Kerakyatan**

**TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN**

Press Gathering Diharapkan Bantu Promosikan Potensi Ekonomi Kerakyatan

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan Press Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI diharapkan dapat membantu mensukseskan pembangunan serta mempromosikan potensi ekonomi kerakyatan di daerah-daerah yang dikunjungi seperti Provinsi Lampung.



Anggota DPR RI Dapil Lampung, Sudin dan Frans Agung Mula Putra bersama Wartawan Koordinatoriat DPR di sentra ikan asin Pulau Pasaran, Betung Timur, Lampung.

“Jadi kedatangan kami ke Bandar Lampung ini tak lain hanya ingin memajukan daerah yang kami kunjungi. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta,” ujar politisi PAN ini.

Karena itu, untuk menjalin komunikasi yang efektif, Taufik mengimbau para wartawan untuk berkomunikasi dengan kepala daerah setempat terlebih dahulu sehingga aspirasi masyarakat yang disambangi bisa tersampaikan dengan baik.

Tak hanya itu, Taufik juga mendorong agar semua kabupaten di Indonesia memiliki hak yang sama secara progresif dan proporsional dalam APBN.

Walikota Bandar Lampung Herman HN menyambut baik kunjungan Watua Taufik Kurniawan didampingi Anggota DPR RI Sudin, dan Frans Mula Agung, berserta Sekretaris Jenderal DPR Achmad Djuned, Kepala Badan Keahlian Dewan Jhonson Rajagukguk dan rombongan Wartawan Koordinatoriat DPR RI.

Herman berharap, kedatangan rombongan dapat membantu perjuangan aspirasi daerah ke pusat, baik di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Ia meminta dukungan pembangunan sejumlah infrastruktur tengah berjalan di Bandar Lampung sehingga bisa berjalan dengan baik.

Herman menambahkan, sejak tahun 2011 Pemprov Kota Bandar Lampung telah menjalankan program kesehatan gratis dan pendidikan gratis. “Semua ini hanya untuk masyarakat tidak mampu,” tandas Herman.

Selain melakukan pertemuan dengan Walikota Bandar Lampung, keesokan harinya rombongan Press Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI melakukan kunjungan ke sentra ikan asin di Pulau Pasaran, Betung Timur, Lampung. ■

(ann). Foto:Runifir

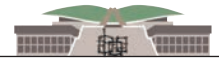
Hal itu disampaikan dalam Press Gathering Koordinatoriat Wartawan DPR RI di Gedung Semergoh, Kantor Walikota Bandar Lampung, Jumat (15/9).

“Tujuan kegiatan ini untuk mensukseskan pembangunan dan melihat potensi ekonomi kerakyatan, seperti produksi Ikan Teri Asin atau yang lebih dikenal sebagai Teri Medan, padahal terinya dari Pulau Pasaran, Lampung. Nah, hal-hal begini yang perlu kita luruskan,” ungkap Taufik.

Dalam sambutannya, Taufik mengemukakan, Press Gathering yang diikuti wartawan media cetak dan elektronik dari berbagai media ini sudah dilakukan di beberapa daerah dalam rangka ikut serta memajukan daerah yang dikunjungi.



Wakil Ketua DPR Korekku Taufik Kurniawan



Delegasi DPR RI Perjuangkan Resolusi Krisis Kemanusiaan Rohingya di Sidang AIPA

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sekaligus Ketua delegasi parlemen Indonesia di Sidang Umum ke-38 ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) menyampaikan posisi tegas, agar parlemen negara-negara ASEAN memberikan sikap atas tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar.

Usulan resolusi tersebut sempat mendapat penolakan keras dari Myanmar. Sehingga mengakibatkan Sidang harus di-skors untuk memberikan waktu bagi tuan rumah untuk memfasilitasi negosiasi antara Indonesia dan Myanmar.

“Kami sebenarnya sangat terbuka kepada Myanmar untuk mengoreksi dan memperbaiki draf resolusi itu, jika mereka keberatan dengan redaksi awal yang kami bawa. Jika mereka keberatan dengan nada kecaman terhadap aksi kekerasan atas etnis Rohingya, kami telah mengusulkan untuk memperlunak resolusi tersebut menjadi resolusi atas krisis kemanusiaan di Myanmar. Mereka menolak juga. Mereka mengatakan tidak ada krisis kemanusiaan di Myanmar,” ujar Fadli Zon usai pertemuan Komite Eksekutif AIPA di Manila, Filipina, Senin (18/9).

Delegasi DPR RI yang terdiri dari Nurhayati Ali Assegaf, Juliari P. Batubara, S.B. Wiryanti Sukamdani, H. Firmandez, Andi Achmad Dara, Sartono Hutomo, Lucky Hakim, Abdul Kadir Karding, Mahfudz Abdurrahman, dan Achmad Fariel mencoba mencari jalan tengah dengan menawarkan rancangan resolusi yang dimodifikasi menjadi isu humanitarianism di Asia Tenggara. Namun delegasi Myanmar tetap menolak. Bahkan usulan Presiden AIPA, Pantaleon D. Alvarez agar delegasi parlemen Myanmar membuat draft resolusi sendiri atas isu Rohingya pun tidak mendapat persetujuan dari pihak Myanmar.

Isu Kemanusiaan Rohingya itu sempat membuat pertemuan Komite Eksekutif AIPA berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kali ini AIPA harus menggelar pertemuan Komite Eksekutif hingga dua kali karena mengalami kebuntuan dan tidak mencapai konsensus terhadap usulan Indonesia tentang isu Rohingya tersebut. ■

Foto: Dok.BKSAP (Ayu.rmp)



Wakil Ketua DPR Korpolkam Fadli Zon dan Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH
Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
PIMPINAN REDAKSI
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
REDAKTUR
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos
SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari, Guntur Dewanto
ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra
Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega
REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias
FOTOGRAFER
Rizka Arinindy, Supardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief
Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah
ADMINISTRASI FOTO
Bagus Mudjiharjanto
ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djutiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)
PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
STAF PRODUKSI
Subadri, S.E., Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom
DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)
ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos
KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Mujiono
PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Remon,
Yuliana Puspita, Ifan
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

Generasi Muda Jangan Alergi Politik



Wakil Ketua DPR Korpolkam Fadli Zon

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta kepada generasi muda untuk tidak alergi terhadap politik. Pasalnya kehidupan di negeri ini tidak bisa lepas dari perpolitikan, untuk itu dia mengapresiasi Sekretariat Jendral yang terus menjalankan amanah *Inter-Parliamentary Union* (IPU) untuk memberikan pendidikan politik dengan menggelar Parlemen Remaja.

“Pendidikan politik penting diberikan kepada generasi muda. Sebab politik adalah cara mengubah keadaan di negeri ini. Maka dari itu saya harap generasi muda jangan alergi politik demi berjalannya demokrasi yang baik dan maju,” paparnya sesaat sebelum membuka acara simulasi sidang parlemen remaja 2017 di ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9).

Lebih lanjut Fadli mengatakan Pendidikan politik menjadi dasar lahirnya generasi penerus dalam kancah perpolitikan, maka dari itu kegiatan ini perlu dilaksanakan terus. Pasalnya forum seperti Parlemen Remaja ini merupakan forum penting untuk menghubungkan DPR RI kepada anak-anak muda kreatif dan intelek dari berbagai pelosok Indonesia sehingga bisa saling bertukar pikiran satu sama lain demi kemajuan negeri ini.

“Berada di tengah-tengah anda, pemuda-pemudi dari Sabang sampai Marauke, saya merasa yakin dan optimis bahwa demokrasi di Indonesia akan semakin berkembang,” ungkapnya.

Parlemen Remaja tahun 2017 ini merupakan penyelenggaraan Parlemen Remaja yang ke-12. Ada 136 peserta yang merupakan hasil seleksi dari 6.800 pendaftar dari seluruh Indonesia. Besar peminat Parlemen Remaja ini, lanjut Fadli menunjukkan jika ada banyak anak muda di Indonesia yang ingin mengetahui bagaimana praktik dan proses demokrasi yang selama ini



berjalan di DPR.

Dalam kesempatan itu, Politisi Partai Gerindra juga menyampaikan peran lembaga legislatif yang berfungsi untuk menyusun undang-undang sekaligus mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang tersebut.

“Fungsi pengawasan bisa dikatakan berjalan dengan baik apabila DPR dapat mengkritisi kebijakan pemerintah

yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sementara itu, fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat,” tuturnya

DPR tidak hanya memiliki peran untuk memproduksi undang-undang, namun juga memastikan ditegakkannya

undang-undang tersebut. Di sini, fungsi pengawasan dan kontrol DPR hanya akan bisa efektif jika ia selalu mengambil posisi kritis terhadap pemerintah. Ini sesuai dengan aspirasi masyarakat menginginkan agar DPR bisa memperjuangkan aspirasi rakyat dan menyuarakan kesulitan-kesulitan hidup rakyat kepada pemerintah. ■

(ria,mp), Foto: Jayadi/hr

Peredaran PCC Pemerintah Kecolongan Lagi



Wakil Ketua DPR Korinbang, Agus Hermanto

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menegaskan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah kecolongan terkait penyebaran obat PCC (Paracetamol, Caffein, and Carisoprodol) di Sulawesi Tenggara yang menyebabkan banyak korban di kalangan remaja dan anak-anak.

“Pemerintah kecolongan lagi. Kami meminta BPOM agar lebih bekerja keras sehingga BPOM tidak boleh kecolongan lagi,” katanya, Sabtu (16/9).

Untuk itu, BPOM selaku wakil

pemerintah dalam pengawasan obat harus bekerja lebih giat lagi. Pimpinan DPR dari Fraksi Demokrat ini mempertanyakan, kenapa hal seperti ini bisa kecolongan lagi? Dari manakah asalnya? Untuk itu dia menegaskan,

hal ini harus di usut sampai tuntas.

Tercatat hingga tanggal 14 September 2017, sudah ada 61 orang yang dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Kendari, akibat overdosis PCC. Kebanyakan dari korban ini merupakan siswa SD dan SMP. “Hal ini harus diinvestigasi secara menyeluruh oleh pihak terkait, baik Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, Kementerian Kesehatan dan juga BPOM untuk dapat mengusut tuntas atas beredarnya obat PCC tersebut, sehingga ke depan tidak ada lagi peredaran obat jenis tersebut.

“Ada yang langsung tak sadarkan diri bahkan meninggal setelah mengonsumsi obat itu. Ada yang selamat tapi mentalnya terganggu, BPOM harus bisa mendeteksi secara dini serta melakukan pengawasan maksimal terhadap peredaran obat-obat yang beredar di masyarakat,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPR Bagian Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini mengatakan, pengusutan harus tuntas, karena efek dari pada obat tersebut sangat berbahaya hingga membuat orang menjadi tidak sadar, dan seperti orang yang tidak waras.. “Saya juga inginkan para korban dapat segera mendapatkan penanganan medis secara serius dan maksimal agar bisa sembuh total,” tutup Agus. ■

(chas,mp) Foto: Chasbi/hr

Dana Desa Berpeluang Sejahterakan Masyarakat



Wakil Ketua DPR Korekku Taufik Kurniawan menjadi pembicara dalam kuliah umum di Departemen Administrasi Publik, FISIP Undip, Semarang

Dana desa menjadi peluang untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Dengan dana desa yang mencapai Rp 1 miliar per desa, dan implementasinya melibatkan masyarakat, dan anggaran dari pemerintah, dana desa diharapkan dapat membangun daerah dan menguatkan energi di Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan mengatakan, saat ini dunia sedang mengalami keseimbangan baru. Hal itu ditandai dengan meledaknya jumlah penduduk dunia. Diprediksi puluhan tahun lagi dunia akan kehabisan energi, dan akan muncul krisis energi, air, dan pangan.

Demikian dikatakan Taufik dalam Kuliah Umum di Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (14/9). Kuliah umum ini mengambil

tema Formulasi Kebijakan Publik dalam Praktik: Peluang dan Tantangan. Hadir dalam acara itu ratusan civitas akademika Undip. Dalam menjalankan kebijakan publik, khususnya implementasi dana desa, Taufik mengingatkan untuk menggunakan konsep *cooperative management*, yakni *academician, businessman, goverment, dan community* (ABGC). Jika tidak melibatkan teori itu, Taufik menilai hal itu hanya seperti program yang turun dari langit, sehingga tidak bisa dijalankan.

"Peluang dana desa apakah bisa menyejahterakan masyarakat, ini tergantung kita. Jika kita melibatkan

ABGC, diharapkan dana desa yang mencapai Rp 1 miliar per desa, dapat memakmurkan masyarakat," kata Taufik.

Legislator Partai Amanat Nasional itu menambahkan, konsep ABGC itu harus

melibatkan masyarakat di desa itu. Sehingga, seluruh stakeholder di desa itu dapat terlibat dalam pemanfaatan dana desa. Bahkan menurut Taufik, konsep ABGC itu juga bisa diterapkan di berbagai program lain.

Di sisi lain, Taufik mengingatkan pemerintah diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam implementasi penyaluran dana desa. Pasalnya, dengan anggaran yang mencapai Rp 60

triliun, berpotensi terjadi penyimpangan dalam penyalurannya ke tingkat desa.

Apalagi, belum adanya struktur organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi hingga tingkat desa, menyebabkan lemahnya pengawasan. Menurut legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah itu, hal ini menjadi titik krusial yang harus diperhatikan pemerintah.

"Aspek pelaksanaan dana desa dari Kementerian Desa harus betul-betul ekstra prudent. Jangan sampai ada penyimpangan, hanya karena permasalahan kurangnya tenaga pendampingan. Selain potensi adanya ruang penyalahgunaan kekuasaan, manakala dana desa ini masuk ke rekening bupati, yang seharusnya ke rekening desa. Ini yang menjadi titik krusial permasalahannya pada kurangnya struktur organisasi dari Kementerian Desa," pesan Taufik. ■

(si.mp), Foto: Sofyan/hr



Badan Legislasi DPR Serap Aspirasi Pemerintah dan Masyarakat Kalteng

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Kunjungan ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait penyusunan program legislasi nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2018. Hal itu dimaksudkan agar RUU yang dihasilkan DPR senantiasa memenuhi aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Dalam pertemuan antara Baleg dan pengusaha perkebunan kelapa sawit dan para tokoh masyarakat adat, Tim Baleg dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Firman Subagio, sedangkan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diwakili oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib H. Said Ismail. Selasa (19/9).

Menurut Wakil Ketua Baleg Firman Soebagio "Tim kunjungan kerja Baleg ke Provinsi Kalteng ini untuk menyerap aspirasi yang mana merupakan tugas baru Baleg, dalam persiapan penyusunan prolegnas prioritas, sosialisasi terhadap RUU, mensosialisasikan UU yang sudah diundangkan sekaligus melakukan pemantauan terhadap implementasi UU," ungkapnya.

Dalam pertemuan itu terdapat Dua isu utama dan menjadi perhatian penting yang berkaitan langsung dengan Pemprov. Kalimantan Tengah. "Empat isu penting telah dibahas tadi diantaranya masalah RUU Perkelapasawitan, RUU Dana Keuangan Perimbangan Pusat dan Daerah, RUU Konservasi dan RUU tentang masyarakat hukum adat," jelas politisi Golkar tersebut.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib H. Said Ismail berharap dengan adanya pertemuan dengan Baleg DPR RI ini, diharapkan bisa tercipta regulasi yang memberikan perlindungan kepada hak masyarakat Kalimantan Tengah dan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Kalteng. ■

(Andri). Foto: Andri/hr



Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyو memimpin Tim Kunker Ke Kalteng

Baleg Ajak Masyarakat Maluku Beri Masukan RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan



Ketua Baleg Supratman Andi Atgas menerima cenderamata dari Sekda Provinsi Maluku

Dalam rangka menyusun dan mensosialisasikan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2018, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengajak seluruh komponen masyarakat Provinsi Maluku untuk memberikan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang terkait percepatan pembangunan di Daerah-daerah Kepulauan yang nantinya akan menjadi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.

“Saya gembira, sambutan yang luar biasa dari Pemerintah Provinsi Maluku dan teman-teman akademisi ini membantu dalam penyusunan

Undang-Undang terkait percepatan akselerasi pembangunan di Daerah-daerah Kepulauan,” ujar Ketua Baleg Supratman Andi Atgas saat pertemuan

dengan Sekda Provinsi Maluku, Panitia Perancang Undang-Undang DPD, Kanwil Hukum dan Ham, Organisasi Masyarakat dan Akademika Universitas Pattimura di Aula Kantor Provinsi Maluku, Senin (18/9).

Menurut Supratman, Baleg banyak menerima masukan terkait batas wilayah yang menyangkut kelautan dan mengenai bagi hasil mengenai hasil pajak dari hasil perikanan untuk diserahkan secara adil ke daerah penghasil khususnya Maluku.

Ia menegaskan, bahwa Baleg akan meneruskan ini kepada pemerintah khususnya Kementerian Perikanan dan Kementerian Keuangan untuk dibuatkan regulasi. Nantinya akan berdampak besar untuk daerah penghasil.

“Menurut saya di tahun 2018 hal ini akan jadi prioritas DPR, karena kalau tidak hal ini akan terjadi disintegrasi bangsa, oleh karena itu dalam hal ini pemerintah pusat harus melakukan percepatan pembangunan agar menciptakan keadilan untuk masyarakat sekitar,” terang pria asal F-Gerindra tersebut.

Nantinya, lanjut politisi Gerindra ini, setiap RUU yang ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Turut hadir anggota Baleg dalam kunjungan spesifik ke Maluku antara lain Ono Surono, Ketut Sustiawan, Wenny Haryanto, Khatibul Umam, Taufiq R. Adullah, dan Adang Sudrajat. ■

(Jay) foto : Jayadi/hr

Komisi I Pilih Tujuh Nama Calon Anggota KIP

Sebanyak tujuh nama terpilih menjadi anggota Komisi Informasi Publik (KIP) setelah mengikuti serangkaian uji kelayakan dan kepatutan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada 13- 14 September 2017.



Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari.

“Semua nama yang dikirim presiden kita lakukan uji kepatutan dan kelayakan dan terpilihlah ke-7 nama ini. Rata-rata mereka jawabannya cukup baik,” ungkap Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasryahri usai pemelihan anggota KIP periode 2017 - 2022.

Ketujuh Komisi KIP terpilih melalui mekanisme pemungutan suara terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Mereka adalah Arif Adi Kuswardono (54 suara), Hendra J Kede (54 suara), Cecep Suryadi (48 suara), Gede Narayana (39 suara), Wafa Patria Umma (32 suara) dan Romanus Ndau (31 suara), dan Tulus Subardjono (29 suara) satu-satunya dari unsur pemerintah.

Kepada KIP terpilih, Kharis berharap pekerjaan rumah berupa tunggakan

perkara terkait sengketa keterbukaan informasi publik yang jumlahnya ribuan segera diselesaikan. “Kami sarankan segera menyelesaikan tumpukan PR yg cukup banyak dan menyelesaikan jawaban atas pertanyaan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, politisi PKS ini mengingatkan anggota terpilih kedepan harus mampu membawa KIP menjadi institusi yang lebih profesional, handal dan independen. Salah satunya dengan mensosialisasikan institusi KIP pada masyarakat. “Perbaikan dari KIP yang lalu sangat kita harapkan. Kedepannya, hal tersebut jangan sampai terjadi lagi,” harapnya.

Salah satu anggota terpilih KIP Tulus Soebarjono, dalam visi misinya berkomitmen akan melakukan penguatan

badan publik dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Karena selama ini masyarakat banyak dibanjiri informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan (*hoax*).

“Badan publiklah yang harus instropeksi, apakah sudah menyampaikan informasi ini kepada publik secara maksimal atau tidak karena hampir 99 persen informasi itu sifatnya terbuka,” terangnya.

Selanjutnya, nama-nama yang sudah terpilih akan dikirimkan ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk segera dijadwalkan pengambilan keputusan di Rapat Paripurna DPR. “Setelah ini, segera kami kirim surat ke Bamus dan menunggu Bamus menjadwalkan Rapat Paripurna,” imbuh Kharis. ■

(ann,mp), Foto:Andri/hr

Komisi II Dan DKPP Bahas Perubahan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Komisi II melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/9). RDP membahas isu-isu strategis perubahan peraturan kode etik penyelenggara pemilu dan peraturan pedoman beracara DKPP.

“Kita membahas mengenai peraturan kode etik penyelenggaraan pemilu yang disusun DKPP berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Pembahasan kode etik penyelenggaraan pemilu tidak banyak mengalami perubahan hanya penyempurnaan dari kode etik sebelumnya,” ungkap Wakil Ketua Komisi II Al Muzzammil Yusuf usai memimpin rapat.

Dalam kode etik, lanjut dia, DKPP mengangkat mengenai aturan penyelenggaraan pemilu yang wajib mengikutsertakan masyarakat yang disabilitas. Hal ini bertujuan agar semua masyarakat dapat berkontribusi memberikan suaranya.

Selain itu, dalam RDP juga membahas mengenai aturan yang melarang adanya pertemuan antara

penyelenggara pemilu dengan partai politik. “DKPP mengusulkan ada aturan tegas yang melarang penyelenggara pemilu melakukan pertemuan secara tertutup atau menerima uang dari partai politik,”ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II Sirmadji yang mengungkapkan mengenai dua agenda yang dibahas dalam RDP yaitu kode etik tata beracara penyelenggara pemilihan umum dan kode etik yang mengatur perilaku penyelenggara itu sendiri. “Ini masih berlangsung kami akan memberikan berbagai masukan saran dan sebagainya, dan keputusan akan dicatat untuk ditindaklanjuti dalam penyempurnaan yang telah disusun,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DKPP Harjono mengatakan tugas DKPP dalam UU baru, linear dengan tugas sebelumnya.



Wakil Ketua Komisi II DPR Al Muzzammil Yusuf

Hanya saja ada penyesuaian dimana DKPP melakukan penyesuaian tugas yang mengacu pada UU 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Misalnya lanjut dia, DKPP telah mengatur terkait larangan bagi penyelenggara pemilu untuk menerima uang, jasa, dan barang atau janji tertentu dari peserta pemilu. Hal ini diatur agar profesionalitas dan integritas penyelenggaraan pemilu dapat segera terbentuk.

“Ini merupakan aturan baru yang tertuang dalam draf peraturan DKPP yang dikonsultasikan dengan DPR dan Pemerintah,”jelasnya seraya menegaskan aturan tersebut dibuat guna menyikapi pengalaman masa lalu dimana sempat muncul polemik dimasyarakat mengenai penyelenggara pemilu yang menerima honor dari parpol. ■

(ria,mp), Foto: Azka/hr

Grup Kerja Sama Sri Langka Segera Terwujud

Grup Kerja Sama Parlemen antara Indonesia dan Sri Langka segera terwujud. Kedua negara sama-sama memandang penting hubungan ini. Diplomasi parlemen bisa semakin mengeratkan kerja sama di segala bidang, baik politik, ekonomi, sampai budaya.



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Sri Langka

“Hubungan kerja sama dengan Sri Langka penting, karena keduanya sama-sama punya pluralisme dan historis yang hampir sama,” ucap Nurhayati. Desakan untuk membuka kerja sama ini, kata Nurhayati, segera diwujudkan agar kedua negara bisa menjalin kerja sama yang lebih konkret di segala bidang.

Sri Langka, sambung Nurhayati, sangat mengapresiasi keramahan dan kekayaan budaya Indonesia. Toleransi juga berjalan baik walau mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. “*People to people contact* akan memberi manfaat bagi kedua negara, terutama untuk kunjungan wisatawan. Kini, sudah banyak orang Sri Langka yang berkunjung ke Indonesia,” kilah politisi Partai Demokrat ini.

Sri Langka juga mengapresiasi keberhasilan DPR RI menggelar acara World Parliamentary Forum di Bali. Nurhayati mengungkapkan, di forum itu isu Rohingnya juga dibahas. Kepada Dubes Sri Langka, Nurhayati menegaskan bahwa tragedi yang menimpa etnis Rohingnya di Myanmar adalah tragedi kemanusiaan dan tidak membawa sentimen agama. “Perempuan dan anak-anak tak berdosa jadi korban kekerasan militer Myanmar,” tegasnya. ■

(mh), Foto: oij/hr

Demikian mengemuka saat Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Sri Langka untuk Indonesia Dharshana

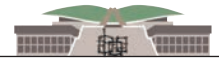
Mahendra Parera, di ruang kerjanya, Selasa (19/9). Permintaan membuka grup kerja sama kedua parlemen disampaikan langsung Dubes Sri Langka ini, lantaran sekian lama belum ada jalinan kerja sama parlemen.

Banggar Sepakati Subsidi Energi 2018

Badan Anggaran DPR RI bersama Panja Pemerintah telah menyepakati sejumlah anggaran subsidi energi di RAPBN 2018 yang dialokasikan sebesar Rp 94,54 triliun. Besaran tersebut lebih besar dari tahun ini sebesar Rp 89,85 triliun di APBN-P 2017.



Ketua Banggar DPR Aziz Syamsuddin



Indonesia-India Perkuat Kerja Sama Sektor Energi

Ketua GKSB DPR RI – Parlemen India Satya Widya Yudha menerima kunjungan Duta Besar India Pradeep Kumar Rawat di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9). Menjalankan fungsi diplomasi parlemen, keduanya membicarakan tentang kerjasama antara Indonesia dan India di berbagai bidang dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing negara, khususnya sektor pertanian dan energi terbarukan.



Ketua GKSB DPR RI-Parlemen India Satya Widya Yudha menerima kunjungan Duta Besar India.

Satya memberikan apresiasi kepada India yang fokus membangun energi terbarukan tenaga surya (solar cell). Ia mengatakan India dan China adalah negara yang patut dicontoh dalam pengembangan energi tenaga surya.

“Ini patut dicontoh bagaimana mereka mengembangkan renewable energy dari tenaga matahari dengan kapasitas yang luar biasa besar dan harganya cukup kompetitif, dibandingkan biodiesel atau biogas,” paparnya.

Solar cell dinilai cara paling murah untuk pengembangan energi berkelanjutan dibandingkan dengan energi fosil dan batu bara. Biaya produksi energi tenaga surya di India bahkan sempat mencapai rekor terendah sepanjang sejarahnya.

Selain itu, disoroti juga mengenai efisiensi energi. Menurutnya, India tengah mengembangkan teknologi untuk lampu LED yang bisa mengurangi penggunaan daya sehingga lebih efisien.

Politisi dari F-Golkar ini menambahkan, dalam waktu dekat Grup Kerja Sama Bilateral akan berkunjung ke Delhi. Dalam kunjungan tersebut, GKSB akan membawa dua isu utama, yakni pertanian dan energi. Keduanya memiliki nilai penting untuk investasi masa depan. Terlebih lagi, Indonesia dan India diprediksi akan menjadi Top-5 negara ekonomi terbesar di dunia.

“Sehingga ini yang menjadi trigger kita. Karena itu kunjungan ke India, kita ingin melihat apa yang sukses di terapkan di India dan bisa diterapkan di Indonesia. Disamping itu, kita juga ingin melihat energi policy disana secara keseluruhan,” tutup Satya. ■

(ann,mp) Foto: Ojfe/hr

“Baik, bisa disepakati yang dipaparkan pihak pemerintah? Sepakat semuanya,” ungkap Ketua Banggar Azis Syamsuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/9).

Kesepakatan ini didapat setelah mendengarkan paparan dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suhasil Nazara. Hal ini dikarenakan adanya penguatan nilai tukar rupiah di RAPBN 2018 maka anggaran subsidi listrik turun tapi masih lebih tinggi dibandingkan APBN-P 2017.

Untuk subsidi listrik, asumsi yang digunakan adalah kurs Rp 13,400 dan ICP USD 48 per barrel. Dengan perubahan asumsi ini maka kebutuhan subsidi tahun berjalan 2018 turun dari Rp 53,238 triliun menjadi Rp 52,660 triliun. Dengan carry over Rp 5 triliun maka subsidi dalam RAPBN 2018 dari Rp 52,238 triliun di

RAPBN menjadi Rp 47,660 triliun,

Sementara itu, untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ditetapkan untuk volume minyak tanah sebanyak 610 ribu kiloliter, sedangkan minyak solar Rp 15,62 juta kiloliter. Sedangkan untuk volume elpiji 3 kg, dalam RAPBN diusulkan volume 6,385 juta matrik ton, namun disepakati dalam Panja sebesar 6,45 juta matrik ton atau naik.

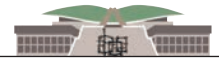
Terkait subsidi gas elpiji 3 kg, Wakil Ketua Banggar Said Abdullah menagih janji pemerintah untuk menyalurkan subsidi elpiji 3 kg secara tertutup. Menurutnya, penyaluran subsidi secara terbuka tidak akan menyasar kelompok masyarakat miskin. Sementara rencana penyaluran subsidi yang terintegrasi dengan program keluarga harapan hanya janji pemerintah dua tahun lalu. ■

(ns), Foto: Jaka/hr

Komisi V Dorong Percepatan Infrastruktur Bolaang Mongondow



Tim Kunspek Komisi V DPR meninjau sejumlah infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulut.



Komisi V DPR RI mendorong infrastruktur Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Pasalnya, dengan berbagai potensi yang ada, Bolaang Mongondow bisa menjadi daerah yang lebih berkembang. Kebutuhan infrastruktur dan perhubungan dibutuhkan untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Bolaang Mongondow.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena saat pertemuan dengan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow, Ketua DPRD Bolaang Mongondow, serta mitra kerja Komisi V DPR RI di Kantor Bupati Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Jumat (15/9).

"95 persen infrastruktur bandara sudah dipersiapkan oleh Pemkab Bolaang Mongondow. Kami harapkan, pelabuhan laut menjadi perhatian. Kebutuhan Rusunawa untuk ASN juga sangat perlu sekali. Kemudian jembatan, serta infrastruktur air bersih diharapkan menjadi perhatian pemerintah," kata Michael.

Politisi F-PD itu menekankan pentingnya pembangunan bandara di Bolaang Mongondow, mengingat perjalanan dari Manado mencapai 3-4 jam perjalanan darat. Apalagi jika lalu lintas sangat padat, maka waktu tempuh perjalanan akan semakin lama.

Anggota Komisi V DPR RI Nurhayati menambahkan, Bolaang Mongondow memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan. Namun kabupaten ini miskin. Berarti ini ada kesalahan pengelolaan dan sudah lama ditinggalkan oleh pemerintah pusat.

"Bandara juga perlu segera dibangun, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Kehadiran bandara sangat dibutuhkan oleh daerah, dalam meningkatkan ekonomi," imbuh Nurhayati.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti berharap, Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menjadi daerah percontohan pembangunan infrastruktur. "Mari kita bangun sama-sama, mulai dari bandara, jalan, sarana transportasi seperti bus. Mari kita dukung pembangunan Bolaang Mongondow," dorong Novita.

Sebelumnya, Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo Mokoagow menjelaskan, Kabupaten yang dipimpinnya merupakan terluas di Sulawesi Utara. Bolaang Mongondow juga merupakan lumbung beras di Sulut. Bolaang Mongondow juga memiliki potensi

tambang emas dan holtikultura. Namun, dengan berbagai potensi itu, masyarakat banyak yang miskin.

"Kabupaten Bolaang Mongondow menempati urutan 14 dari 15 kabupaten dan kota termiskin se-Sulut. PAD per tahun hanya Rp 39 miliar. Kalau tidak ada tambahan dari Pemerintah Pusat, Bolaang Mongondow akan sulit untuk membangun," jelas Yasti.

Terkait infrastruktur, Bolaang Mongondow dilewati jalan nasional sepanjang 198 kilometer. Namun, banyak ruas jalan yang rusak karena abrasi. Bahkan beberapa ruas jalan yang berpotensi amblas karena abrasi.

"Jalan ndeso banget, kami minta ada pelebaran jalan. Saya minta tahap awal pembangunan jalan selebar 30 meter," imbuh Yasti.

Dia juga menekankan perlu dibangunnya bandara, mengingat jarak yang cukup jauh dari Manado, dimana terdapat Bandara Sam Ratulangi. Pemkab sudah menghibahkan tanah seluas 400 hektar untuk dibangun bandara.

"Semua persyaratan dan persiapan sudah 95 persen. Akses menuju lokasi sudah dipersiapkan. Tinggal perlu ada soil tanah, namun sudah kami anggarkan di APBD-P. Kami harap pembangunan bandara selesai dalam waktu tiga tahun," tambah Yasti.

Selain itu, Yasti mengaku pihaknya membutuhkan rusunawa untuk Aparatur Sipil Negara. Karena Bolaang Mongondow memiliki jumlah ASN terbanyak kedua di Sulut.

Dalam kunjungan ini, Tim Komisi V DPR juga meninjau lokasi Bandara Bolaang Mongondow di Desa Lalow, Jalan Nasional Kaiya Maelang, Terminal Tipe A d Desa Dulangon, Waduk Lolak di Desa Pindol, dan Pelabuhan Labuan Uki.

Kunjungan ini juga diikuti oleh Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati (F-PDI Perjuangan), Rendy M. Affandy Lamadjido (F-PDI Perjuangan), Agati Sulie Mahyudin (F-PG), Novita Wijayanti (F-Gerindra). Kemudian Bahrum Daido (F-PD), Syahrulan Pua Sawa (F-PAN), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (F-PKB), Nurhayati (F-PPP), Lalu Gede Syamsul Mujahidin (F-Hanura). ■

(si/mp), Foto: sofyan/hr

Bali Bisa Jadi Tempat Tumbuh Kembangnya Budaya Literasi Bangsa



Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra (tengah)

Adil Hendra, Undang Undang no 3 tahun 2017 tentang Sisbuk telah disahkan pada tanggal 24 Mei 2017 lalu. Oleh karena itu Komisi X melakukan sosialisasi ke beberapa daerah sekaligus akan memantau tercapainya harga buku 3M yaitu Mutu, Murah, Merata

Politisi F-Gerindra ini menambahkan, dengan adanya UU Sisbuk ini juga untuk memperkuat literasinya. Sebagai informasi, survei atas 61 negara Indonesia menempati peringkat 60 literasinya, hanya satu tingkat diatas negara Bostwana, Afrika.

Maka menurut SAH yang juga Ketua Panja Kerja RUU Sistem Perbukuan, dalam kunjungan kerja spesifik ini akan dilakukan sosialisasi dengan berbagai *stakeholders* pendidikan, baik itu Forkompimda, Pemerintah Daerah, SKPD hingga unsur teknis pelaksana seperti sekolah dan pustaka.

“Selain dialog dengan Forkompimda dan SKPD kita akan turun ke sekolah - sekolah untuk melihat kondisi perbukuan di pustaka sekolah,” tutur Politisi dari F-Gerindra dapiil Jambi ini. ■

(azka.mp) Foto:Azka/hr

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menyebutkan, kunjungan ke Bali kali ini untuk mensosialisasikan dan juga menyerap aspirasi juga menampung masukan-masukan di daerah agar nantinya terakomodir semua kepentingan pendidikan dari semua lapisan masyarakat.

“Kunjungan ini bagian dari uji petik dalam sosialisasi UU Sistem Perbukuan (sisbuk). Bali menjadi pilihan, karena kekuatan adat budaya pulau dewata ini diyakini bisa menjadi tempat tumbuh berkembangnya budaya literasi bangsa yang kuat sebagaimana tujuan UU ini,” jelasnya, Kamis (14/9) di Denpasar, Bali.

Selama di Provinsi ini, Tim Kunspek Komisi X menggelar pertemuan dengan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Prov Bali serta beberapa lapisan masyarakat di aula Kemendikbud setempat.

Menurut SAH-panggilan akrab Sutan

Komisi X Minat Baca di Kalsel Cukup Bagus

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang minat baca masyarakatnya sudah cukup bagus, hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat bertemu dengan Sekda Kalsel dan dinas terkait, Kamis (14/9).

“Animo masyarakat Kalsel mendatangi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan buku maupun bahan bacaan lain seperti pameran buku cukup tinggi. Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan yang dikelola Pemprov, Kabupaten dan Kota juga cukup tinggi, itu dari data yang kita peroleh,” ungkap Fikri.

Sementara itu dalam budaya menulis, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tokoh yang cukup produktif dalam menulis buku. Buku yang ditulis antara lain terkait makanan tradisional, budaya Banjar, rumah adat, cerita rakyat, pantun, dan peribahasa.

Pokitisi PKS ini juga sampaikan bahwa indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Selatan pada



Bantuan BOS Selalu Terlambat

Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan kunjungannya ke Provinsi Sumatera Utara ingin melihat langsung kondisi yang ada di sekolah-sekolah sebab ada informasi di beberapa kabupaten kota di Serdang, kota Medan dan juga Binjai, bantuan operasional sekolah (BOS) selalu terlambat.

“Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk kurikulum 2013 sangat disayangkan selalu terlambat. Ini akan menjadi catatan penting dan akan kita sampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat Raker,” katanya di kantor Gubernur Sumut baru-baru ini.

Ketika memimpin kunjungan kerja spesifik sosialisasi UU Sistem Perbukuan, politisi dapil Jabar ini menyebutkan, bahwa pelaksanaan Kurikulum 2013 terhambat distribusi buku. “Kurikulum 2013 akan dilaksanakan sementara distribusi buku terlambat, bahkan mendekati akhir semester buku itu baru berdatangan,” jelasnya.

Untuk itu, kata Ferdiansyah, masalah ini akan menjadi bahan pertimbangan apakah memang tidak sebaiknya diberlakukan seperti

dulu dimana hak kopinya dibeli oleh negara kemudian soal pencetakannya atau penggandaannya itu diserahkan kepada Pemda dan pemerintah

Sebelumnya Ferdi menyatakan sangat bersyukur kedatangan Tim Kunspek Komisi X disambut dengan sangat baik, karena undang-undang ini memberi dampak yang positif khususnya dalam konteks perbukuan. Mulai dari kepala dinas, penerbit, diikuti guru-guru kemudian juga para pemangku kepentingan dalam dunia perbukuan menyambut baik lahirnya UU Sisbuk.

Namun demikian, masih banyak sekolah mengalami kekurangan buku, tidak hanya dalam bentuk jumlah tapi juga buku yang tidak tepat sasaran. Buku tidak pas untuk pelajar SMP itu diberikan kepada pelajar SMP, tidak pas untuk pelajar SD diberikan untuk pelajar SD.



Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah

“Ini menjadi sorotan kita bersama, Komisi X banyak menerima informasi dari Provinsi Sumut dan akan dijadikan bahan Raker bersama pemerintah, bagaimana membuat pahatan atau peta jalan dalam konteks pelaksanaan undang-undang Sistem Perbukuan,” tambahnya. ■

(rief.mp), Foto: Antef/hr



Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih

tahun 2016 terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya IPM di Kalimantan Selatan.

Pada tahun 2016, IPM Kalimantan Selatan telah mencapai 69.05. Angka ini meningkat sebesar 0.67 poin jika dibandingkan dengan IPM Kalimantan Selatan pada tahun 2015 sebesar 68.38. Pada tahun 2016, pembangunan manusia di Kalimantan Selatan masih berstatus “sedang”, masih sama dengan status tahun sebelumnya.

IPM Kalimantan Selatan pada tahun 2016 tumbuh sebesar 0,98 persen dibandingkan

tahun 2015. Selama periode 2015 hingga 2016, komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Anak-anak usia 7 tahun pada tahun 2016 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,29 tahun, meningkat 0,08 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,89 tahun, meningkat 0,13 tahun dibandingkan tahun 2015.

“Kita berharap Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat lebih meningkatkan perhatiannya terhadap peningkatan budaya literasi guna mendorong masyarakat yang berperan dan bersaing dalam tingkat global,” ungkapnya. ■

(skr.mp) Foto: Singgih/hr



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmon Junaidi Mahesa mengunjungi Mapolda Kalsel

Komisi III Soroti Kinerja Aparat Penegak Hukum Kalsel di Kasus Tipikor

Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang juga Ketua Tim Kunjungan Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan Desmon Junaidi Mahesa, menyoroti kinerja Kejaksaan dan Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi, pasalnya masih banyak kasus yang berceceran di Kejaksaan maupun Kepolisian yang belum terselesaikan.

Hal itu diungkapkan Desmon saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Kapolda Kalimantan Selatan Brigjen Pol Drs. Rachmat Mulyana beserta jajaran aparat penegak hukum Provinsi Kalimantan Selatan dan para akademisi di ruang aula Mapolda Kalimantan Selatan, Kamis, (14/9).

Dalam kesempatan tersebut, desmon memaparkan bahwa Kejaksaan maupun Kepolisian masih memiliki citra yang kurang

baik di masyarakat dalam penyelesaian perkara Tipikor, sehingga masyarakat lebih memercayakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Desmon juga menyarankan Kejaksaan dan Kepolisian dituntut untuk melakukan penelitian-penelitian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kasus tipikor. Dirinya juga menanyakan jumlah kasus tipikor yang sudah diselesaikan Kejaksaan dan Kepolisian.

“Jumlah tipikor di kejaksaan dan dari kepolisian ke kejaksaan banyak mana? Proses penangkapan dan penindakannya?” tanya politisi Partai Gerindra tersebut.

Dalam forum tersebut pun masing-masing institusi yang bersangkutan mengungkapkan jawabannya, menurutnya Kepolisian 10 kasus tipikor, Kejaksaan 16 kasus tipikor, dengan rincian 28 kasus disidik kepolisian, 8 dan 2 diantaranya perkara pungli.

Desmon pun meminta masing-masing Institusi memperbaiki Administrasi Pencatatan kasusnya.

Sementara terkait evaluasi program pemberantasan korupsi pasca demokrasi, dirinya menilai, adanya beberapa masukan dari para akademisi perguruan tinggi Kalimantan Selatan, dibutuhkan sinergitas juga koordinasi antar aparat penegak hukum, agar peradilan yang ada dapat cepat diselesaikan.

“Kalo kita penyidikan wilayah Jaksa dan Polisi, nah harusnya pihak hakim menyampaikan hal ini ke jaksa dan polisi agar proses ini tidak berlanjut di peradilan. Kalau masih berlanjut berarti ini kurang koordinasi diantara aparat penegak hukum,” tandas Politisi Daerah Pemilihan Banten.

Sementara Kapolda Rachmat Mulyana memaparkan, dalam 5 tahun terakhir 2013 target 19 kasus, penyelesaian 25 kasus, 2017 sampe bulan september target 19 yang sudah diselesaikan 11 kasus. Kasus yang masih dalam proses penyidikan 15 kasus.

Rachmat pun menyadari, dengan adanya pertemuan ini dirinya mendapatkan masukan yang berharga sebagai penyidik.

“Dimana notabene kita pun harus eksis dalam hal pemberantasan korupsi. Banyak hal-hal yang positif yang kita dapatkan dan banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita sampaikan. Ya mungkin bisa ditindak lanjuti oleh komisi III yang saat ini melaksanakan Kunspek ke kita,” tutup Kapolda Provinsi Kalimantan Selatan Brigjen Pol Drs. Rachmat Mulyana. ■

(ndy/mp) Foto: Nadya/hr

MKD Sosialisasikan Kode Etik DPR ke Polda Jabar

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD), Adies Kadir menilai perlunya sosialisasi tentang Undang-undang MD3 (MPR, DPR RI, DPD RI, DPRD) terutama yang terkait dengan kode etik DPR RI kepada Polda yang ada di Indonesia dan seluruh aparat penegak hukum. Hal ini diungkapkannya dalam kunjungan kerja MKD ke Polda Jawa Barat, Bandung, Kamis (14/9).

“Kami perlu mensosialisasikan Undang-undang MD3 ini, terutama yang terkait kode etik DPR RI, kepada jajaran Polda dan seluruh aparat penegak hukum di Indonesia. Hal ini semata untuk meningkatkan komunikasi sekaligus persamaan persepsi dengan kepolisian akan adanya kode etik yang mengikat seluruh anggota DPR RI,”ungkap Adies.

Dijelaskannya, sebagaimana amanat konstitusi MKD lah yang berwenang untuk menegakkan kode etik yang telah disusun dan disetujui bersama tersebut. Tujuan utamanya tak lain untuk menegakkan marwah dan kehormatan lembaga DPR RI secara keseluruhan.

Kode etik DPR RI ini, lanjut politisi dari Fraksi Partai Golkar, terkadang juga terkait dengan aparat penegak hukum. Sebut saja, ketika salah seorang anggota DPR RI terkena kasus pidana. Ketika sudah ada keputusan hukum yang tetap, maka MKD memiliki wewenang untuk melakukan tindakan atau “pemecatan” terhadap anggota DPR RI tersebut.

Begitupun ketika aparat kepolisian ingin melakukan penggeladahan terhadap anggota DPR RI, maka MKD berhak mendapatkan informasi sebelumnya dan ikut mendampingi aparat kepolisian tersebut. Pada kesempatan itu, Adies mengungkapkan sejauh ini MKD telah dua kali melakukan pemecatan terhadap anggota DPR RI. Hal itupun diamini oleh anggota MKD DPR RI lainnya yang ikut dalam kunjungan kerja ke Polda Jawa Barat, seperti Sumandjaja, M Syafi'i, M. Dzaki Siradj, Fadholi, Agung, Maman Imanulhaq, Daeng Muhammad.

Sementara itu, Kapolda Jawa Barat, Agung Budi Maryoto yang menerima kunjungan tersebut mengapresiasi langkah MKD melakukan sosialisasi tersebut. “Saya berterimakasih dan mengapresiasi atas kunjungan dan sosialisasi tentang kode etik anggota DPR RI oleh MKD. Dan semuanya sudah jelas dan tercantum dalam buku kode etik dan tata beracara yang diserahkan kepada kami tadi. Dengan adanya buku tersebut sudah jelas sekali aturannya dan kami akan sosialisasikan ke anggota kami,”ungkap Kapolda Jawa barat, Agung Budi Maryoto. ■

(Ayur/mp) Foto: Ayu/hr



Wakil Ketua MKD DPR, Adies Kadir bersama Kapolda Jabar

Pansus Angket KPK Berharap Bisa Konsultasi dengan Presiden



Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi dan Masinton Pasaribu saat jumpa pers

Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi dan Masinton Pasaribu menggelar jumpa pers di Jakarta, Senin (18/9). Pihaknya telah berkirim surat kepada Pimpinan DPR dan meminta diadakan Rapat Konsultasi dengan Presiden. Rapat Konsultasi diharapkan digelar sebelum tanggal 28 September. Surat tersebut sudah dikirim ke Pimpinan DPR dan akan segera dikirim ke Presiden.

Menurut Masinton, Pansus menemukan beberapa hal yang signifikan, berkaitan 4 hal yakni tentang tata kelola kelembagaan KPK, tata kelola Anggaran KPK, tata kelola Sumber Daya Manusia KPK dan Penegakan Hukum dalam hal pemberantasan korupsi. Dari beberapa temuan ini akan dilaporkan pada

Rapat Paripurna tanggal 28 September mendatang.

Sebelum ke Rapat Paripurna, Pansus akan menyampaikan kepada Presiden agar nanti bisa mengkaji dan mempelajari temuan Pansus dalam hal menata politik hukum dan pemberantasan korupsi ke depan agar semakin kokoh dan semakin maju serta negara mampu membangun

system anti korupsi yang lebih baik.

Dalam jumpa pers ini, Pimpinan Pansus juga membawa lima koper berkas terdiri laporan hasil RDP dan RDPU Pansus Angket KPK, Hasil Audit BPK atas Laporan keuangan KPK, Berkas Pengaduan Posko Angket KPK, Daftar Temuan Angket KPK dan Laporan Temuan Pansus Angket KPK.

Saat ditanya sejauhmana keterikatan Presiden dengan Pansus untuk berkonsultasi, Taufik mengatakan kerja Pansus Angket adalah kerja konstitusional yang sangat penting. Sedangkan persoalan jadwal, itu persoalan lain apakah bisa memenuhi jadwal itu, tergantung Presiden.

“Kami berpikir, untuk melaporkan sebab akan memberikan pemahaman kepada Presiden dalam hal hubungan antar lembaga. Memang ini pertama kali Pansus mengajukan permohonan konsultasi tapi mestinya bisa bersama dengan Pimpinan DPR sehingga Presiden akan menghargai dan konsultasi bisa digelar,” katanya.

Terkait Isi koper, kata Masinton berisi dokumen ada daftar asset sitaan KPK, juga ada dokumen SDM KPK Karena ada beberapa pegawai KPK diangkat tanpa surat persetujuan institusi asal pegawai yang bersangkutan.

Ketika didesak apakah temuan itu akan dikonfirmasi dan klarifikasi kepada KPK, Pansus Angket berharap KPK bisa hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. Dimana sesuai amanat UU, pertanggungjawaban dan laporan KPK disampaikan kepada Presiden, BPK dan DPR-RI. Ini dimaksudkan agar terang benderang dan tidak sepihak, maka kehadiran KPK menjadi penting. “Kalaupun KPK tidak hadir, kami tetap melaporkan fakta-fakta ini dalam Rapat Paripurna DPR. Kalau KPK tidak hadir yang rugi rakyat,” kata Masinton. ■

(mp), Foto:Runi/hr

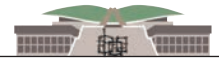
Komisi VIII Pertanyakan Struktur RKA-KL 2018 Kemenag

Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama yang dilaksanakan Kamis (14/9) memiliki makna strategis. Karena diharapkan dari rencana kerja dan anggaran Kementerian Agama itu akan mampu memenuhi kebutuhan mendesak di bidang pendidikan dan kehidupan keagamaan.

Demikian dikatakan Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong saat memimpin raker di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Menurutnya, melalui pembahasan RKA-KL 2018 maka dapat berkontribusi secara optimal dalam upaya mensukseskan pembangunan pemerintah, khususnya program pemerintah.

Oleh karena lanjut dia, secara garis besar ada tiga hal pokok yang mendasar yang memerlukan penjelasan dari Menteri Agama, yakni bagaimana struktur RKA-KL Kementerian Agama tahun 2018 dan dialokasikan untuk rencana program kerja apa saja sesuai tugas pokok tersebut.

Komisi VIII juga mempertanyakan program prioritas apa saja yang



Baleg DPR Serap Aspirasi Masyarakat Sultra

Wakil Ketua Baleg DPR RI Arif Wibowo mengatakan bahwa tujuan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI ke berbagai provinsi adalah dalam rangka untuk menyerap aspirasi yang terkait dengan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang yang selama ini berlangsung dalam masyarakat, dan juga menyangkut rencana Undang-Undang yang akan diusulkan dalam Prolegnas Tahun 2018.

“Pada bulan Oktober, Baleg bersama dengan KemenkumHam yang mewakili pemerintah akan membahas tentang tugas legislasi Tahun 2018. Itulah sebabnya kami melakukan serapan kepada seluruh jajaran dan stakeholder, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi, serta masyarakat secara langsung,” ujar Arif saat melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (18/9).

Dalam menyusun Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, Baleg akan bersikap terbuka terhadap berbagai hal yang menjadi masalah yang dihadapi, baik yang menyangkut Undang-Undang yang sudah dilakukan maupun kepada kemungkinan adanya persoalan hukum atau peraturan yang perlu dan penting bagi masyarakat. “Itulah yang ingin kita rumuskan nantinya dalam penyusunan Prolegnas Tahun 2018,” ucapnya.

Melihat pentingnya melibatkan daerah dalam penyempurnaan pembahasan RUU Prioritas Tahun 2018 tersebut, Arif menjelaskan bahwa undang-undang yang akan disusun itu akan berlaku secara nasional, dan dampaknya juga pada daerah. Tidak hanya Pemerintah Daerah atau pemangku pemerintahan lainnya, tetapi juga masyarakat secara langsung.

“Oleh karenanya kami perlu mendengarkan secara baik apa-apa saja

yang menjadi keinginan dan kehendak masyarakat, supaya nanti dalam menyusun dan membahas Prolegnas ataupun undang-undang yang menjadi usulan masyarakat itu tetap menjamin aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas, dan tidak menimbulkan eksekusi yang tidak kita inginkan bersama,” papar Arif.

Ia berharap agar semua pihak, baik masyarakat, Pemda dan seluruh

pemangku kepentingan yang ada, dapat menyampaikan segala hal yang dirasa perlu dan penting yang dapat dijadikan bahan masukan bagi Baleg dalam menyusun Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.

“Kita akan pikirkan, apakah keluhan yang disampaikan tersebut perlu untuk ditindaklanjuti dalam politik legislasi kita saat penyusunan undang-undang,” tandasnya. ■

(dep.mp), Foto: dep/hr



Wakil Ketua Baleg DPR RI Arif Wibowo menerima cenderamata dari Pjt Gubernur Sultra



Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parosong

direncanakan oleh Kementerian Agama dalam anggaran tahun 2018, dan perlu adanya penjelasan apakah dalam menyusun program dan anggaran tahun 2018 terdapat program baru, inisiatif baru, atau program apa yang berkelanjutan.

Sebelumnya Ali sempat memaparkan bahwa agenda pembahasan rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama RI adalah mengenai rencana kerja dan anggaran Kementerian/lembaga (RKA-KL) Kementerian Agama tahun anggaran 2018.

“Sesuai mekanisme dalam ketatanegaraan bahwa pembahasan RAPBN berdasarkan pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD3, yang merupakan salah satu ruang lingkup tugas Komisi VIII DPR di bidang anggaran adalah mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan RAPBN yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah,” jelasnya.

Selain itu, mengadakan pembahasan dan mengajukan usulan penyempurnaan RAPBN. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program Kementerian atau lembaga, serta menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud, kepada Badan Anggaran untuk dilakukan sinkronisasi. ■

(dep.mp), Foto: Andri/hr

Dermaga Tongging Sumut Belum Memadai

Dermaga Tongging di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut), belum memadai sebagai lokasi penyeberangan Danau Toba menuju Pulau Samosir dan sekitarnya. Akses jalan dan penerangan juga kurang mendukung.

Ilmu yang terungkap saat delegasi Komisi V DPR RI mengunjungi Dermaga Tongging, Jumat (15/9). Pemda setempat belum mengajukan proposal usulan pembangunan dermaga. Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis yang memimpin delegasi ini, menyerukan agar Pemda segera mengajukan usulan proyek pembangunan dermaga, agar Tongging bisa menjadi salah satu destinasi menarik di Danau Toba.

“Kita ingin lihat sejauh mana infrastruktur di Danau Toba ini. Perlu ditata akses jalan masuk menuju Tongging. Dan yang perlu juga dibangun di sini adalah desa



Tim Kunspek Komisi V DPR meninjau Dermaga Tongging di Sumut

wisata,” ungkap Fary. Otoritas Pemda setempat menjelaskan, ada tiga desa di sekitar Dermaga Tongging yang bisa

disulap menjadi desa wisata. Akses jalan yang berliku dan sempit perlu dibangun kembali, terutama di sepanjang jalan Merepanji, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo.

Yang perlu dibenahi pula akses listrik sepanjang jalan desa-desa yang dilalui menuju dermaga. Terlihat masih gelap dan tak ada lampu penerang di sisi-sisi jalan. Pemda setempat mengusulkan penerangan dengan menggunakan energi surya. Anggota Komisi V Anthon Sihombing memaparkan, kelak Di Karo akan ada akses tol menuju Dermaga Tongging di sepanjang sisi Danau Toba. Akses tol ini sangat strategis untuk membangun pariwisata setempat.

Fary menambahkan, di Dermaga Tongging perlu ditambah kapal penumpang dan kapal Basarnas untuk melengkapi fasilitas penyeberangan. Di dekat dermaga ini juga masih terlihat banyak keramba ikan milik masyarakat setempat. Komisi V DPR dan Kementerian Perhubungan menunggu proposal pembangunam Dermaga Tongging, seperti apa desain pembangunan dermaga yang diinginkan Pemda Karo. ■

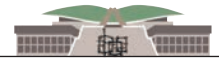
(mh,mp), foto: husen/hr

Masyarakat Harapkan Pelabuhan Seget Segera Dibangun



Ketua Tim Kunspek Pansus Angket Pelindo II DPR RI John Kenedy Azis

Penerbitan Global Bond oleh PT Pelindo II senilai USD 1,58 miliar pada tanggal 5 Mei 2015 dimaksudkan untuk membiayai beberapa proyek salah satunya pengembangan Pelabuhan di Sorong, Papua Barat. Pengembangan pelabuhan ini dimaksudkan dalam rangka membantu mengembangkan rute pelayaran di Wilayah Indonesia Timur. Sorong sendiri akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sehingga pembangunan infrastruktur di daerah tersebut gencar dilakukan.



Ketua Tim Kunspek Pansus Angket Pelindo II DPR RI John Kenedy Azis memimpin langsung Tim Pansus Pelindo II mengunjungi Distrik Seget yang direncanakan akan dibangun Pelabuhan Seget. Rencana Pembangunan Pelabuhan Seget mendapatkan kucuran dana dari Global Bond sebesar Rp 2,4 triliun. Pelabuhan Seget merupakan pengembangan terminal peti kemas Pelabuhan Sorong yang berperan sebagai hubungan regional bagian Timur.

“Kita datang kesini untuk menyelidiki Pelindo II yang menggunakan dana *global bond* untuk pembangunan Pelabuhan

Seget sebesar Rp 2,4 triliun,” ungkap John Kenedy Azis baru-baru ini.

Selain itu, politisi Partai Golkar ini sampaikan bahwa kunjungan ke Desa Seget untuk melihat secara jelas bagaimana kesiapan Pelindo II untuk pembangunan Pelabuhan Seget yang menggunakan dana *global bond* sebesar Rp 2,4 triliun,” ungkapnya.

John juga katakan bahwa ternyata belum ada pembangunan fisik yang terlihat, karena Pelindo II masih terkendala perizinan dari lembaga dan kementerian terkait yang belum selesai.

Sementara itu, masyarakat Distrik Seget mengharapkan Pembangunan

Pelabuhan Seget segera dilakukan karena rencana pembangunan pelabuhan tersebut sudah sejak tahun 2011. Mereka mengharapkan jika Pelabuhan Seget dibangun maka akan mempermudah akses menuju Sorong, jika ditempuh melalui darat dari Distrik Seget ke Sorong akan menempuh waktu hingga 4-5 jam, sedangkan jika melalui jalur laut akan menempuh waktu 1-2 jam.

Menanggapi hal tersebut, John mengatakan, pembangunan pelabuhan yang dilakukan BUMN harus melalui prosedur dan mekanisme yang ada serta aspek-aspek pendukungnya harus benar-benar terpenuhi. ■

(skr.mp), Foto: Singgih/hr

Pembangunan Port Baru di Pelindo IV Tak Bisa Dihindarkan

Konektivitas ekspor dan impor antar daerah yang ada di Indonesia maupun ke luar negeri merupakan salah satu penunjang peningkatan ekonomi nasional. Selain itu konektivitas antar daerah di Indonesia yang terpisah lautan juga bisa meminimalisir disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat di daerah yang jauh dari pusat. Kunjungan Tim Pansus Pelindo ke PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang ada di Makassar adalah guna melakukan pengawasan pada kinerja BUMN ini.



Wakil Ketua Pansus Angket Pelindo II Teguh Juwarno

Kunjungan Kerja Spesifik ini dipimpin Wakil Ketua Pansus Pelindo Teguh Juwarno. Ia memaparkan sudah seharusnya Pelindo IV melakukan pengembangan dengan membangun port baru. Menurutnya pembangunan port baru di Pelindo IV tak bisa dihindarkan.

“Ini kalau tidak dilakukan pengembangan maka nanti yang terjadi akan stuck pelayanannya. Kemudian

dwelling time, akan bisa menjadi masalah lagi, yang ujungnya tidak menjadi kompetitif di dunia usaha ini. Yang harus disegerakan membangun port baru. Itu sudah tidak bisa dihindarkan,” ujar Teguh di Pelindo IV, Makassar, Selasa (19/9).

Konektivitas Pelindo IV bisa menciptakan deflasi di Timur Indonesia. Ekspor langsung melalui konektivitas di Kawasan Timur membuka peluang misi dagang yang lebih besar. Hasil produksi petani dan pengrajin Sulawesi Selatan dan kawasan Timur Indonesia bisa langsung diangkut dari Makassar, ekspor ke 45 negara dan sebaliknya impor bisa langsung tiba tanpa harus melalui Surabaya ataupun Tanjung Priok.

Menurut pihak Pelindo IV, dengan direct call biaya logistik dari dan ke kawasan Timur Indonesia, pengusaha bisa

menghemat sekitar 40% biaya. Terlebih lagi dengan pembangunan port baru, ke depan, proses ekspor langsung bisa dilakukan di daerah timur. Daerah-daerah seperti Maluku, Ambon untuk komoditas ekspor saat ini masih dipusatkan di Pelabuhan Makassar.

Menurut informasi dari Pelindo IV, target pada 2018 akhir sudah selesai tahap satu pembangunan port baru. Sedangkan target proyek tuntas pada 2026. Dengan luas wilayah Indonesia Timur 50% dari luas keseluruhan wilayah Indonesia, kini ekspor langsung sudah bisa menuju 54 negara serta 65 produk disamping bisa menghemat biaya, dari semula Rp 4 juta per kontainer kini hanya Rp 1,7 juta karena waktu tempuhnya menjadi cepat. Untuk ekspor ke China dari 24 hari kini hanya 16 hari. ■

(eko), Foto: eko/hr





Deputi Administrasi Setjen DPR RI Mardian Umar mewakili Ketua DPR dan Sekjen DPR RI menerima Penghargaan Opini WTP dari Kemenkeu.



DPR Terima Penghargaan Opini WTP

Deputi Administrasi Setjen DPR RI Mardian Umar mewakili Ketua DPR dan Sekjen DPR RI menghadiri acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2017 dengan tema 'Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Indonesia Sejahtera', di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Kamis, (14/9).

Pada kesempatan tersebut DPR RI menerima plakat penghargaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2017 yang diberikan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKKL dan LKPD yang diperoleh secara berturut-turut oleh DPR RI.

"Saya mengucapkan syukur alhamdulillah, hari ini saya mewakili Ketua DPR dalam rangka menerima penghargaan atas peraihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). DPR sudah delapan kali berturut-turut mendapat opini WTP ini," ujar Mardian Umar.

Mardian mengatakan, walaupun DPR banyak mendapat perhatian dari masyarakat, namun ternyata dalam pengelolaan anggarannya DPR tetap baik, hingga mendapat opini WTP.

"Ada tiga aspek dalam laporan keuangan ini yang harus diperhatikan. Pertama, kesesuaian dalam standar akuntansi pemerintah. Kedua, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. DPR bersama pemerintah yang membuat undang-undang, maka kita buktikan bahwa DPR patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Dan aspek yang ketiga adalah mengenai efisiensi pengendalian internal," jelasnya.

Ia juga menyatakan, bahwa selama ini Ketiga aspek tersebut telah dipenuhi oleh Dewan dan Setjen DPR sebagai *supporting system*, yang mendukung hal-hal terbaik dalam rangka pencapaian WTP pada pengelolaan anggaran negara.

"Kami berharap masyarakat dapat menilai hal-hal positif yang dilakukan DPR dan Setjen DPR kedepannya. Kita akan berusaha keras untuk dapat mempertahankan predikat WTP ini," pungkasnya. ■

(dep.mp) Foto: Kresno/hr





Wakil Ketua Komisi IV DPR, Roem Kono melakukan sidak komoditas cabe dan bawang merah yang mengalami penurunan harga di Pasar Palmerah Slipi, Jakarta, Rabu (20/9). Foto: Kresno

Komisi I DPR memilih tujuh anggota Komisi Informasi Publik (KIP) melalui mekanisme *voting* terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat, Kamis (14/9). Foto: Andri



Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema "Rencana Pengembangan Kawasan Parlemen : Pembangunan Alun-Alun Demokrasi dan Gedung DPR RI" dan dibuka langsung oleh Ketua BURT, Anthon Sihombing, Rabu (20/9). Foto: Jayadi